

ABSTRAK

KAJIAN KOORDINASI LINTAS SEKTOR DALAM PENGAWASAN PERLINDUNGAN EKOSISTEM *MANGROVE* (Studi di Kota Karang, Kelurahan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung)

Oleh

HIYO LINDA MAARANI

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terjadinya kerusakan dan penurunan kualitas ekosistem *mangrove* di wilayah pesisir yang memerlukan upaya pengawasan dan perlindungan secara berkelanjutan. Ekosistem *mangrove* memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan pesisir. Oleh karena itu, perlindungan ekosistem *mangrove* memerlukan koordinasi lintas sektor antara instansi pemerintah dan pihak terkait agar pengawasan dapat berjalan secara efektif. Namun dalam praktiknya, koordinasi antarinstansi dalam pengawasan *mangrove* masih menghadapi kendala yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji koordinasi lintas sektor dalam pengawasan perlindungan ekosistem *mangrove* di Kelurahan Kota Karang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan proses koordinasi antarinstansi dalam pelaksanaan pengawasan *mangrove*. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang berasal dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), organisasi lingkungan, serta masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pengawasan ekosistem *mangrove*. Penelitian ini menggunakan teori koordinasi dari Malayu S. P. Hasibuan yang meliputi kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja, dan disiplin kerja sebagai indikator analisis koordinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi lintas sektor dalam pengawasan ekosistem *mangrove* telah dilakukan melalui pertukaran informasi dan penanganan laporan masyarakat. Namun demikian, pelaksanaan koordinasi tersebut belum berjalan secara efektif karena kegiatan pengawasan bersifat reaktif dan lebih sering dilakukan ketika terdapat laporan kerusakan *mangrove*. Hambatan dalam koordinasi meliputi keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran operasional, keterbatasan sarana dan prasarana, kompleksitas birokrasi antarinstansi, serta faktor sosial ekonomi masyarakat pesisir. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi yang lebih sistematis dan kejelasan pembagian tugas agar pengawasan dan perlindungan ekosistem *mangrove* dapat berjalan efektif.

Kata Kunci: Koordinasi Lintas Sektor, Pengawasan, Ekosistem *Mangrove*

ABSTRACT

STUDY ON CROSS-SECTORAL COORDINATION IN THE SUPERVISION OF MANGROVE ECOSYSTEM PROTECTION

(Study in Karang City, Teluk Betung Timur Village, Bandar Lampung City)

By

HIYO LINDA MAARANI

This research is motivated by the damage and decline in the quality of mangrove ecosystems in coastal areas, which require continuous monitoring and protection. Mangrove ecosystems play an important role in maintaining coastal environmental balance by preventing erosion, providing habitats for marine organisms, and supporting coastal livelihoods. Therefore, protecting mangrove ecosystems requires cross-sector coordination between government agencies and related parties so that supervision can be carried out effectively. However, in practice, inter-agency coordination in mangrove supervision still faces obstacles that affect its effectiveness. This study aims to analyze cross-sector coordination in the supervision mangrove ecosystem protection in the Kota Karang sub-district. The study uses a descriptive method with a qualitative approach to describe the coordination process in mangrove supervision. Data were collected through interviews, observations, and documentation with informants from the Environmental Agency (DLH), the Marine and Fisheries Agency (DKP), environmental organizations, and communities involved in mangrove monitoring. This research applies the coordination theory of Malayu S. P. Hasibuan, which includes unity of action, communication, division of labor, and work discipline as indicators of coordination analysis. The results show that coordination in mangrove supervision has been carried out through information exchange and community reports, but it has not been effective because monitoring activities are mostly reactive and conducted after reports of mangrove damage. Obstacles include limited human resources, operational budgets, facilities, bureaucratic complexity between agencies, and socio-economic factors of coastal communities. Therefore, stronger coordination and clearer task division are needed to support more effective mangrove ecosystem monitoring and protection.

Keywords: *Cross-Sector Coordination, Supervision, Mangrove Ecosystem.*